

---

---

# Opini Publik Sebagai Determinan Upaya Indonesia Dalam Isu Protes Malaysia Terkait Regulasi Penenggelaman Kapal

Luh Mitha Sari Anggreni<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan determinan upaya diplomasi publik pemerintah Indonesia dalam merespon isu protes Malaysia terkait regulasi penenggelaman kapal dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan Indonesia terhadap kapal nelayan Malaysia yang melintasi wilayah perairan Indonesia menuai kecaman dari publik Malaysia yang menilai bahwa penenggelaman kapal merupakan tindakan konfrontasi sepihak dari pemerintah Indonesia. Akibatnya, terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia sehingga membutuhkan upaya responsif dari Indonesia untuk meredakan ketegangan kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep opini publik dalam kebijakan luar negeri dengan menganalisis bagaimana opini publik menjadi determinan upaya diplomasi publik Indonesia sebagai respon atas opini publik Malaysia. Penelitian ini menemukan jawaban bahwa upaya diplomasi publik Indonesia adalah dengan melakukan pengelolaan berita, *focus group discussion* (FDG), serta kerja sama dengan investor Malaysia.

**Kata-kunci** : diplomasi publik, kebijakan penenggelaman kapal, opini publik

---

## Abstract

*This research aims to describe the determinants of the Indonesian government's public diplomacy efforts in responding to the issue of Malaysian protests regarding ship sinking regulations using a qualitative-descriptive method. The policy of sinking ships implemented by Indonesia on Malaysian fishing boats crossing Indonesian waters has drawn criticism from the Malaysian public who consider the sinking to be an act of unilateral confrontation from the Indonesian government. As a result, tensions arise in Indonesia-Malaysia relations, which require responsive efforts from Indonesia to defuse tensions between the two countries. Therefore, this study uses the concept of public opinion in foreign policy by analyzing how public opinion determines Indonesia's public diplomacy efforts in responding to Malaysian public opinion. This research finds the answer that Indonesia's public diplomacy efforts include managing news, focus group discussions (FDG), and cooperation with Malaysian investors.*

**Keywords** : Malaysian public opinion, public diplomacy, public opinion in foreign policy, sinking ship policy

---

**Kontak Penulis**

Luh Mitha Sari Anggreni

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916

E-mail: mithasari378@gmail.com

## PENDAHULUAN

Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengambil kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia sejak lama. Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kala itu telah mengawasi implementasi aturan tersebut. Peraturan kemudian dipertahankan dibawah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Namun berbeda dengan pemerintahan presiden sebelumnya, kebijakan Jokowi tidak dilaksanakan dengan cara yang sama.

Larangan penenggelaman kapal yang melakukan kegiatan *illegal fishing* tidak diterapkan secara konsisten selama SBY berkuasa (2004–2009). Pemerintah pada saat itu telah mempertimbangkan seberapa sering peraturan tersebut dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain. Adapun kapal asing yang melakukan tindak penangkapan ikan ilegal kemudian dihibahkan kepada nelayan, serta perguruan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi dan penelitian di bidang kelautan. Terdapat dua alasan utama mengapa implementasi penerapan kebijakan penenggelaman kapal menghindari ekspos media, yaitu: 1) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencegah timbulnya pandangan negatif dianggap terlalu mempermasalahkan nelayan asing, 2) menghindari permusuhan antara Indonesia dengan negara lain yang mendapat sanksi akibat kapal karam tersebut (Amelia, 2017).

Minimnya publikasi aktivitas menenggelamkan kapal, turut serta dipengaruhi oleh konsep politik luar negeri yang dianut pemerintahan SBY, yaitu "*Millions Friends Zero Enemy*". Merujuk pada tulisan Ziyad Falahi (2013), konsep tersebut menjelaskan bahwa pemerintah

menghindari menciptakan ketegangan dengan negara lain dengan berlandaskan prinsip tanpa musuh sehingga menciptakan netralitas Indonesia. Sedangkan menurut Rahma Amelia (2017), bahwa sebagai upaya dalam menyelesaikan isu terkait pencurian ikan secara ilegal, pemerintah lebih mengedepankan penerapan jalur diplomasi, sehingga menjadikan sanksi penenggelaman kapal bukan jalur utama dalam menyelesaikan masalah terkait pencurian ikan secara ilegal.

Berbeda dengan pemerintahan Jokowi, upaya serta sikap dalam menangani isu terkait pencurian ikan secara ilegal lebih difokuskan dengan penerapan kebijakan penenggelaman kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan 32 kapal penangkap ikan asing terbalik antara 2009 dan 2011 saat Presiden SBY menjabat. Selain itu, tidak ada informasi tentang penerapan peraturan kecelakaan antara September 2011 dan 2014. Sementara itu, total 516 kapal tenggelam dari 2014 hingga 2019 selama pemerintahan Jokowi (KKP, 2019). Penenggelaman kapal secara intens pada masa pemerintahan Jokowi dilandasi oleh konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang termuat pada Nawacita Presiden Jokowi.

Sejak diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku tindak IUUF (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) diperkirakan bahwa strategi ini akan memperburuk hubungan antarnegara. Salah satu negara yang memberikan respon negatif terhadap kebijakan penenggelaman kapal adalah Malaysia. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya opini publik melalui media masa Malaysia terkait ketidaksenangan publik dengan kebijakan penenggelaman kapal (Hussain, 2018). Apalagi hubungan Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1963

memang selalu mengalami pasang surut, yang membuat Malaysia selalu merespon secara reaktif kebijakan apapun yang dibuat oleh Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep dalam menganalisis permasalahan, yaitu Opini Publik dalam Kebijakan Luar Negeri, serta Diplomasi Publik. Sebagaimana disampaikan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen (2010) bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan tertentu sehingga kebijakan tersebut diciptakan sebagai upaya mempertahankan atau mengubah suatu keadaan dengan didasarkan atas kepentingan negara sebagai pembuat kebijakan. Mengutip dari Alex Mintz dan Karl DeRouen (2010) bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu faktor internasional atau faktor eksternal dan faktor domestik atau faktor internal. Faktor internasional tersebut diantaranya seperti perlombaan senjata, pencegahan, tipe rezim dari musuh, maupun aliansi. Sedangkan faktor domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri pada umumnya berkaitan erat dengan politik domestik suatu negara pembuat kebijakan luar negeri serta kondisi ekonomi suatu negara. Selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, penentuan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh opini publik.

Selanjutnya, upaya diplomasi publik dipahami sebagai sebuah upaya pemerintah Indonesia dalam merespon isu protes Malaysia terkait kebijakan penenggelaman kapal. Diplomasi publik dimaknai sebagai sebuah proses komunikasi pemerintah terhadap publik asing di luar negeri dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Jay Wang (2006) bahwa diplomasi publik adalah usaha dalam meningkatkan mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya diplomasi publik meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya yang dalam penerapannya tidak lagi di monopoli oleh pemerintah. Adanya opini publik dalam bentuk protes dari publik Malaysia yang timbul akibat penerapan regulasi penenggelaman kapal oleh Indonesia merupakan dinamika yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan data pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana opini publik sebagai determinan upaya diplomasi publik Indonesia dalam merespon isu protes Malaysia terkait regulasi penenggelaman kapal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, serta sumber data sekunder berupa dokumen dari situs internet maupun cetak. Negara sebagai unit analisis difokuskan ke arah determinan diplomasi publik Indonesia dalam merespon isu protes Malaysia terkait regulasi penenggelaman kapal. Kajian ini selanjutnya melakukan analisis data dengan merangkai informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yang selanjutnya disajikan sebagai kesimpulan dalam bentuk prosa naratif dan disesuaikan dengan topik masing-masing bab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia dan Malaysia adalah negara bertetangga dalam kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dan Malaysia berbatasan langsung baik melalui darat maupun melalui lautan. Melalui kedekatan wilayah tersebut, Indonesia dan Malaysia

kemudian menjalin hubungan diplomatik sejak 31 Agustus 1957, tepat pada saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Selain menjadi negara serumpun, Indonesia dan Malaysia juga telah menjalin hubungan bilateral di berbagai bidang, diantaranya adalah kerja sama pada bidang pendidikan, ekonomi, serta meliputi kerja sama pada bidang ketenagakerjaan.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia benar-benar mendahului kemerdekaan kedua negara dari penjajahan selama beberapa abad, dimulai pada abad VII ketika kerajaan Sriwijaya berkuasa dan berlanjut sampai abad XVI puncak kerajaan Samudra Pasai. Sekalipun ada hubungan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, selalu ada pasang surut dalam hubungan tersebut. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kedua negara mengalami konflik di antara mereka sendiri antara tahun 1963 dan 1965.

Pengakuan akan pentingnya perairan teritorial yang krusial bagi kepentingan semua bangsa di dunia menandai awal dari masalah keamanan maritim. Karena perairan merupakan saluran utama untuk perdagangan internasional dan interaksi keamanan, keamanan maritim menjadi perhatian penting bagi banyak negara, tidak hanya Indonesia. Memahami dan mengejar domain kelautan sebagai *focal point* kebijakan memastikan keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional maritim, dengan dampak bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi (Nugraha et al., 2016: 175).

Maka untuk mengatasi isu maritim di atas, pemerintah pada masa Presiden Jokowi menerapkan serangkaian kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah menerapkan kembali kebijakan penenggelaman kapal yang sebelumnya sempat dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penerapan kembali

kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki ketegasan dalam mengatasi serangkaian aktivitas IUUF.

Selanjutnya, opini publik dari tercipta ketika masyarakat Malaysia mengetahui kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal sebagai kebijakan strategis pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi diketahui publik Malaysia ketika terjadi penahanan terhadap 200 nelayan asal Malaysia pada tanggal 19 November 2014. Tahun tersebut merupakan periode awal terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tahun tersebut, kepemimpinan Presiden Jokowi menegaskan mengenai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga pemerintah menerapkan suatu kebijakan untuk merealisasikan visi tersebut.

### **Analisis Karakter Masyarakat Malaysia**

Karakter opini publik masyarakat Malaysia ini merupakan fenomena yang dapat dianalisis dengan menggunakan konsep kategori pengklasifikasian opini publik. Neack (2008) menjelaskan tiga kategori opini publik. Mereka yang berpengetahuan luas, atau mereka yang tidak tertarik dengan politik internasional, adalah kelompok pertama. Kedua, orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang peristiwa-peristiwa internasional, khususnya mereka yang berkepentingan dengan isu-isu kebijakan luar negeri. Ketiga, orang-orang yang tidak hanya peduli dengan kebijakan luar negeri, tetapi benar-benar berpartisipasi di dalamnya; kategori ini biasanya mencakup kelompok elit dan intelektual.

Pengembangan dan penyebaran gagasan oleh kelompok kognitif, yang berkontribusi pada pembentukan kepentingan dan preferensi nasional, serta identifikasi peserta yang sah dalam proses pembuatan kebijakan dan penentuan hasil akhir dengan menyelesaikan konflik kepentingan yang ada, membuat mereka pemain yang signifikan. Dalam hal ini, salah satu komunitas epistemik Malaysia yang sangat ahli dalam mengedukasi publik tentang kebijakan kapal karam Indonesia adalah media. Hal ini mengingat orang-orang yang tergabung dalam media Malaysia adalah profesional dengan keahlian dan kompetensi pada bidang tertentu, seperti ilmuwan atau akademisi dari universitas di Malaysia, maupun wartawan dengan keahlian di bidang jurnalis pada media berita di Malaysia. Hal ini terlihat dari adanya tulisan seorang profesor bidang politik di salah satu universitas Malaysia yang menulis di media surat kabar *New Straits Time* (15/12/2014) tentang kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh Indonesia.

Media sebagai komunitas epistemik di Malaysia memiliki peran dalam memberikan informasi kepada publik, yaitu dengan meliput fenomena-fenomena yang terjadi di Malaysia. Selanjutnya, fenomena tersebut dipublikasikan kepada publik melalui situs media yang ada. Pada akhirnya, informasi yang disampaikan oleh media Malaysia tersebut menjadi konsumsi publik atau pembicaraan publik.

### **Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Era Jokowi**

Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah maritimnya dilakukan dengan melanjutkan kembali kebijakan penenggelaman yang sempat dihentikan Presiden SBY. Pemerintah Indonesia

memilih menerapkan kembali kebijakan penenggelaman kapal karena didasarkan atas banyaknya aktivitas IUU *fishing* oleh nelayan-nelayan asing dari negara lain di wilayah perairan Indonesia. Penerapan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku aktivitas *illegal fishing* berdasarkan atas ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan aktivitas IUU *fishing* di perairan Indonesia dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas atau Satuan Pencegahan dan Pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) yang selanjutnya disebut Satgas 115. Pembentukan Satgas 115 berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Selanjutnya, kebijakan ini diterapkan dengan mengundang awak media dalam melakukan aksi penenggelaman kapal. Hal ini sesuai dengan maksud pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku aktivitas IUU *fishing* di perairan Indonesia. Adapun media massa tersebut kemudian memberitakan penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia termasuk memberitakan nama negara asal kapal yang melakukan pencurian ikan tersebut. Beberapa media yang memublikasi kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah CNN Indonesia, BBC News Indonesia, Liputan6 Indonesia, maupun VOA Indonesia. Media tersebut memublikasikan berita secara intens terkait aktivitas pemerintah dalam menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan serangkaian tindakan perikanan ilegal di perairan

Indonesia. Selain itu, media massa nasional tersebut turut serta menyajikan berita terkait pertanyaan-pernyataan pemerintah sebagai bentuk ketegasan Indonesia dalam memerangi serangkaian aktivitas *foreign illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia.

### **Analisis Media Malaysia Terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Indonesia Era Jokowi**

Sesuai dengan kasus ini, media Malaysia menyebarkan berita secara intens terkait kebijakan kapal karam pemerintah Indonesia. Strategi implementasi kebijakan kapal karam yang digunakan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan dalam agenda media. Berita yang ditampilkan didominasi dengan kecenderungan media yang terkesan tidak sependapat dengan kebijakan penenggelaman tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan yang memiliki kecenderungan untuk mengkritik ataupun memprotes kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebagaimana media massa Malaysia yang bernama *Utusan* menuliskan berita terkait kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun judul yang diangkat oleh media tersebut adalah "*Maaf Cakap, Inilah Jokowi*" yang dituliskan pada Minggu, 23 November 2014. Pada penulisan beritanya memiliki kecenderungan menonjolkan sikap Presiden Jokowi yang angkuh dalam melakukan penindakan terhadap nelayan Malaysia yang melewati batas perairan Indonesia.

Media selanjutnya yang menuliskan berita terkait kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia adalah *New Straits Times*. *The Straits Times* didirikan pada tahun 1845, menjadikan *The New Straits Times* surat kabar berbahasa Inggris pertama di negara itu. Media tersebut menuliskan

berita dengan judul "*Troubling Display of Populism*" yang dituliskan pada Senin, 15 Desember 2014. Pada penulisan beritanya, media tersebut memiliki kecenderungan menonjolkan berita terkait keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap nelayan asing yang melakukan aktivitas perikanan di wilayah Indonesia.

Melalui pemberitaan yang dituliskan oleh media *New Straits Times* menunjukkan bahwa adanya *agenda setting* yang dilakukan oleh media tersebut. Pada kasus ini, *agenda setting*-nya menekankan pada isu kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Media tersebut memiliki kecenderungan menuliskan kritik terkait penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun dalam penulisannya, media memfokuskan pemberitaannya terhadap dampak yang akan ditimbulkan bagi keberlanjutan organisasi regional ASEAN atas penerapan kebijakan penenggelaman kapal tersebut.

### **Ketegangan Hubungan Indonesia dan Malaysia Oleh Opini Publik Malaysia**

Ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia terlihat dari adanya opini dari publik Malaysia yang bermuara pada protes publik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Protes publik tersebut terlihat dari adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah nelayan dan pemilik kapal yang berasal dari Malaysia. Adapun aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di kantor Kedutaan Besar Indonesia yang berlokasi di Kuala Lumpur Malaysia (Reuters, 24/07/2019). Para nelayan serta pemilik kapal melakukan aksi protes terhadap Indonesia yang sering melakukan penangkapan terhadap nelayan asal Malaysia karena dianggap telah

melakukan aksi pencurian ikan. Adapun aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan pengawasan dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) (Septiawan, 26/07/2019). Setelah aksi unjuk rasa tersebut turut serta diwartakan oleh para wartawan yang meliput kegiatan tersebut.

### **Upaya Diplomasi Publik Indonesia Sebagai Respon Atas Opini Publik Malaysia**

Upaya dipoomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diawali dengan adanya mekanisme *G to G (government to government)* terlebih dahulu. Pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan sebuah diplomasi antar negara karena pemerintah memiliki kekuasaan dalam suatu negara tersebut. Pada mekanisme tersebut, Indonesia melakukan pendekatan secara personal dengan melakukan pertemuan atau kunjungan kerja serta membahas terkait isu maritim antara kedua negara maupun menjalin beberapa kesepakatan bersama dengan pemerintah Malaysia.

Kunjungan kerja yang dimaksud adalah kunjungan bilateral yang dilakukan presiden Indonesia dengan Malaysia sebagai negara tujuan pertama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Malaysia adalah salah satu prioritas bagi pemerintahan Jokowi. Selain dari pada itu, kunjungan Jokowi ke Malaysia turut serta menjadi sarana pemerintah dalam mengatasi isu terkait ketidakjelasan perbatasan wilayah negara yang kerap menjadi faktor terjadinya aktivitas IUUF di wilayah teritorial Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Malaysia secara bilateral selama di sana, bertemu dengan Perdana Menteri Najib

Razak (Reuters, 05/02/2015). Terkait konferensi tersebut, kedua negara mencapai berbagai kesepakatan, salah satunya adalah penyelesaian cepat sengketa perbatasan masing-masing. Selain itu, kedua negara memutuskan untuk memulai diskusi teknis mengenai perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia pada 24-26 Februari 2015. Kedua negara juga memutuskan untuk menyelesaikan protokol umum pada diskusi tersebut, yang tidak hanya mencakup masalah perbatasan. Nelayan di perairan yang status kepemilikannya masih tumpang tindih ditangani dengan SOP (*overlapping claim area*).

Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi isu protes Malaysia terkait regulasi penenggelaman kapal oleh Indonesia, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan berita yang disebarkan melalui media Indonesia. Penyebaran informasi atau berita yang hendak disajikan tersebut ditujukan tidak untuk publik domestik tetapi juga publik internasional, termasuk publik Malaysia. Sari (2018) menulis bahwa implementasi upaya tersebut juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan memerintahkan wartawan Indonesia untuk membuat berita terkait penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia sebagai respon dari kecaman publik Malaysia melalui media Malaysia. Adapun media daring yang ikut serta berperan dalam upaya melakukan pengelolaan berita diantaranya adalah *Liputan6, Detik, Republika, CNN Indonesia, BBC News, VOA Indonesia* dan lainnya.

Selanjutnya, upaya pemerintah dalam merespon opini dari publik Malaysia adalah dengan memanfaatkan kanal Youtube sebagai media dalam



memberitakan terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya unggahan yang memuat tanggapan Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, terhadap tulisan media Malaysia yang menyebutkan bahwa Jokowi bersifat angkuh. Melansir dari *Berita Satu* (01/12/2014), Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kebijakan penenggelman kapal pencuri ikan asing salah satunya memiliki tujuan untuk menghemat biaya pengelolaan kapal sitaan.

Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa penenggelman kapal sering dilakukan oleh negara lain termasuk kapal nelayan yang melanggar dan mencuri ikan di perairan wilayah negara lain. Selain itu, Jusuf Kalla menyatakan bahwa penenggelman kapal tidak dilakukan semena-mena karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pencuri ikan. Menurut Jusuf Kalla (2014) apabila kapal tersebut tidak ditenggelman dan tidak dipanggil oleh negara yang bersangkutan maka biaya pemeliharaan kapal akan merugikan negara.

Selain melalui *Youtube*, pengelolaan berita juga dilakukan melalui *Twitter* dari akun resmi milik KKP maupun melalui akun milik Susi Pudjiastuti. Adapun video yang ditautkan melalui *Twitter* oleh KKP memuat penjelasan secara detail mengenai regulasi penenggelman kapal. Pada video tersebut Pudjiastuti menegaskan bahwa penenggelman kapal memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, dan pemerintah hanya menegakkan kembali hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Pudjiastuti menyatakan bahwa tindakan penenggelman kapal adalah sebuah tugas negara dalam menjalankan perintah dari Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Selanjutnya, Pudjiastuti mengingatkan

bahwa regulasi penenggelman kapal adalah sebagai bentuk ketegasan dari Presiden Jokowi untuk menghentikan atau menyelesaikan masalah pencurian ikan yang masih begitu masif terjadi di perairan Indonesia dimana keputusan untuk menenggelman kapal-kapal tersebut berdasarkan atas keputusan pengadilan (KKP 2018).

Selanjutnya, upaya diplomasi publik Indonesia dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Menurut Kresno et al. (1999), pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam diskusi cukup khusus karena mereka membantu untuk secara jelas mendefinisikan isu-isu unik topik yang akan dieksplorasi. Selain itu, diskusi tersebut dapat mengungkapkan informasi tentang alasan di balik pandangan seseorang atau kelompok terhadap subjek yang sedang dibahas. Adapun upaya diplomasi publik Indonesia melalui diskusi tersebut dilakukan melalui mekanisme *people to people contact*, yaitu dengan diwakili oleh salah satu universitas kedua negara.

Salah satu upaya diplomasi publik melalui *focus group discussion* oleh Indonesia dilakukan pada 20 Agustus 2019. Sebanyak 43 mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Terengganu di Malaysia, 30 profesor dan profesional medis dari disiplin ilmu kelautan dan kepulauan, serta 11 intelektual Indonesia, ikut serta dalam perbincangan tersebut (Romdhoni, 2019). Salah satunya adalah Rokhmin Dahuri, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dan akademisi Universitas Terengganu Malaysia. Selain itu, pertemuan dan diskusi tersebut turut serta menyinggung tentang peristiwa-peristiwa *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal baik di Indonesia dan Malaysia dengan tujuan untuk mendalami masalah

khusus yang berkaitan dengan kemaritiman kedua negara.

Upaya diplomasi publik Indonesia selanjutnya dilakukan melalui kerja sama di bidang maritim. Salah satu kerja sama di bidang maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia adalah dengan memberikan peluang bagi investor asal Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia terutama di bidang maritim. Cicilia (2015) dalam tulisannya menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan membuka peluang bagi investor yang berasal dari Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu dijabat oleh Susi Pudjiastuti menyambut dengan baik pengusaha Malaysia yang berniat untuk melakukan investasi di sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Investasi ini dilakukan karena Malaysia mengalami penurunan stok ikan sehingga membutuhkan bantuan dari negara Indonesia yang memiliki stok ikan yang berlimpah.

Upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas opini dari publik Malaysia telah berhasil diterapkan. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan respon positif yang diberikan oleh Malaysia yang sebelumnya sempat menyatakan protes dan tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Adapun respon yang diberikan Malaysia tersebut adalah adanya perubahan kebijakan domestik Malaysia.

## PENUTUP

Menurut penelitian ini, opini publik Malaysia berdampak pada pilihan orientasi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Sentimen yang diungkapkan oleh warga Malaysia menunjukkan adanya ketidaksetujuan yang meluas terhadap strategi penanggulangan pemerintah Indonesia. Melalui pemberitaan yang

disampaikan oleh Media Malaysia tersebut memuat adanya peran media terhadap pemberitaan-pemberitaan dengan tujuan untuk mengkonstruksi opini dari publik Malaysia. Selanjutnya, opini dari publik Malaysia tersebut memunculkan suatu gerakan sosial dan politik yang mengarah pada protes dan tuntutan berupa aksi unjuk rasa kepada pemerintah untuk mengambil langkah atas permasalahan tersebut. Maka dari itu, Indonesia melakukan upaya diplomasi publik dengan melakukan pengelolaan berita, *focus group discussion* (FDG), serta kerja sama dengan investor Malaysia.

## Daftar Pustaka

- Beritasatu. (2014). "JK Tanggapi Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh". Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/nasional/229411/jk-tanggapi-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuh#!>. Diakses tanggal 4 Desember 2022.
- Cicilia, Sanny. (2015). "Malaysia Minat Investasi Perikanan di Indonesia". Tersedia di: <https://industri.kontan.co.id/news/malaysia-a-minat-investasi-perikanan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.
- Falahi, Ziyad. (2013). Memikirkan Kembali Arti *Millions Friends Zero Enemy* Dalam Era *Paradox of Plenty*. Jurnal Global dan Strategis. Vol. 7, No. 2.
- Hakim, Wulan Nurul. (2019). Respon Malaysia Terhadap Kebijakan Penenggelaman *Sinking-Ship* Indonesia. *Frequency of International Relations*. Vol. 1, No.1.
- Hussain, Ku Seman Ku. (2014). "Maaf cakap, inilah Jokowi". Tersedia di: <https://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-%201.28094>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.
- Umanda, Umaya Beby. (2019). Diplomasi Publik Indonesia ke Malaysia Paska Kebijakan Penenggelaman Kapal Malaysia di Laut Indonesia. *Frequency of International Relations*. Vol. 1, No.1.
- Irhamna. (2020). Kerja Sama Indonesia dan Malaysia Terkait Penanggulangan Illegal,

- Unreported, Unregulated *Fishing* di Selat Malaka Melalui *MoU Common Guidelines* Periode 2016-2019. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Kelautan dan Perikanan, 2019*.
- N, Rahma Amelia W. (2017). Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016). Skripsi. Universitas Negeri Jember.
- Neack, Laura. (2008). *Chapter 7: Public and Media, dalam The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher.
- Noor, F., (2014). *Troubling Display of Populism*. Tersedia di: <https://www.nst.com.my/news/2015/09/troubling-display-populism>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Nugraha, M.H.R. & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* 1(2), pp. 175-182.
- Trisni, Sofia. (2016). Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada masa kepemimpinan presiden SBY. *Andalas Journal of International Studies*. Vol.5, No.2, 135.
- Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan).
- Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan).
- Reuters. (2015). "Tantangan Jokowi dalam Kunjungan ke Malaysia". Tersedia di: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/02/150204\\_malaysia\\_jokowi](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150204_malaysia_jokowi). Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Reuters. (2019). "Indonesia Tangkap Puluhan Kapal, Nelayan Malaysia Protes". Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190724191834-106-415213/indonesia-tangkap-puluhan-kapal-nelayan-malaysia-protos>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.
- Romdhoni, Helmi. (2019). "Pembicara FGD Di Malaysia, Rokhmin Ungkap Potensi Ekonomi Maritim Indonesia". Tersedia di: <https://www.inanews.co.id/2019/08/pembicara-fgd-di-malaysia-rokhmin-ungkap-potensi-ekonomi-maritim-indonesia/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
- Septiawan, Agus. (2019). "Pemilik Kapal Nelayan Demo KBRI Kuala Lumpur". Tersedia di <https://lampung.antaraneews.com/berita/342872/pemilik-kapal-nelayan-demo-kbri-kuala-lumpur>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022